

Analisis Pengelolaan Keuangan di Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh

Muhammad Lintang^{1*}, Rusnaidi², Fathul Khaira³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh

Email Penulis Correspondensi : lintangmuhammad97@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya, Kota Banda Aceh, dengan fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan aparatur desa dan masyarakat sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya masih menghadapi beberapa kendala, termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai sistem pencatatan keuangan belum dioptimalkan, menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, peningkatan transparansi dengan menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Gampong, Transparansi, Akuntabilitas, Peran Masyarakat

Abstract—This research aims to analyze financial management in Gampong Lampoh Daya, Banda Aceh City, with a focus on the planning, implementation, recording, reporting, and monitoring processes. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving village officials and the community as the main informants. The results showed that financial management in Gampong Lampoh Daya still faces several obstacles, including limited capacity of human resources (HR), lack of transparency, and low community participation in supervision. In addition, the use of the Siskeudes application as a financial recording system has not been optimized, causing errors in recording and reporting. Based on these findings, this study recommends increasing human resource capacity through periodic training, increasing transparency by providing financial information openly to the community, and encouraging community participation in the supervision process to ensure more effective and accountable village financial management.

Keyword : Gampong Financial Management, Transparency, Accountability, Community Role.

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian skripsi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir. Proses ini seringkali mengalami berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman teoritis, keterbatasan waktu, hingga kesulitan dalam mengakses data. Penyelesaian skripsi juga merupakan salah satu tahap krusial dalam perjalanan akademik mahasiswa, terutama bagi mahasiswa akuntansi. Mahasiswa Muhammadiyah Aceh dihadapkan pada tantangan yang beragam dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidak hanya melibatkan kemampuan akademik, tetapi juga aspek-aspek lain seperti motivasi, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyelesaikan studi. [1] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi dan kemampuan menulis karya ilmiah berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian skripsi tepat waktu.

Gampong merupakan bagian dari konstitusional Negara Republik Indonesia. Membangun Gampong berarti membangun sebagian penduduk Indonesia. Hal ini sangat mudah dimengerti karena lebih dari delapan 80% (delapan puluh per seratus) masyarakat Indonesia tinggal di gampong. Pengelolaan keuangan gampong (desa) merupakan elemen penting dalam keberhasilan pembangunan gampong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan infrastruktur pada gampong tersebut.

Sebagai salah satu desa di Provinsi Aceh, Gampong Lampoh Daya memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat melalui dana desa, serta Pendapatan Asli Gampong (PAG). Kebijakan tersebut tertulis dalam beberapa undang undang pemerintahan dengan desentralisasi melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. UU ini juga mengatur mengenai beberapa pengaturan, kependudukan, jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa[2].

Pada akhir tahun anggaran, laporan tentang pelaksanaan APBD disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat, badan permusyawaratan gampong (desa), dan masyarakat dalam musyawarah desa, paling lambat satu bulan sebelum tahun berakhir, laporan realisasi harus dikirim. Sanksi atas keterlambatan menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBD menyebabkan atau dikirim tepat waktu, itu akan memiliki konsekuensi bahwa dana transfer tidak diberikan. Oleh karena itu, jika laporan pertanggungjawaban tidak selesai tidak akan dialokasikan dengan tepat, yang akan mempengaruhi kinerja operasi desa pada tahun anggaran selanjutnya. Laporan yang tidak dikirim tepat waktu dapat menunjukkan masalah administrasi atau hambatan dalam mengelola keuangan gampong. Akibatnya, desa harus bekerja lebih keras untuk memenuhi tanggung jawab dan tetap terlibat dalam siklus pengelolaan keuangan tersebut [3].

Pengawasan keuangan di tingkat desa dan gampong sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Di banyak tempat, gampong merupakan unit terkecil yang memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya dan juga pelayanan publik. Karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis pengelolaan keuangan di gampong guna memahami bagaimana sumber daya dikelola dan dialokasikan untuk kebaikan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak gampong yang menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam pengelolaan keuangan. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi beberapa faktor yang menghambat perbaikan pengelolaan keuangan. Selain itu, isu-isu seperti penyalahgunaan dana, ketidaktransparanan, dan kurangnya akuntabilitas sering kali mengemuka, yang berdampak negatif pada pembangunan gampong. [4].

Perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan semua aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan sebagai pengelola keuangan [5]. Oleh karena itu, pengelolaan mencakup semua aspek suatu organisasi, seperti administrasi, personal, ketatausahaan, dan peralatan dan prasarana. Administrasi menjadi sangat penting untuk kegiatan pelaksanaan. Ketidakteraturan administrasi pada tahap pelaksanaan menyebabkan kegiatan penataan usaha yang buruk. Akibatnya menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan desa akan menjadi sulit bagi pejabat desa yang berwenang.

Salah satu cara untuk memastikan orang yang bertanggung jawab atas pengolahan keuangan desa adalah dengan mengikuti aturan administrasi. Praktik pengolahan keuangan desa yang tidak teratur dapat menjadi salah satu sumber korupsi kepala dan staf desa. Selain itu, sistem pemerintah untuk mengelola keuangan juga tidak berfungsi, sebagai konsekuensi gampong gagal melaksanakan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Dengan kata lain, akuntabilitas desa dalam pengelolaan keuangan ditunjukkan oleh kinerja administrasi yang baik dan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan [6].

Jika desa memenuhi hak masyarakat untuk mengakses informasi, desa dianggap memenuhi prinsip transparansi. Ini karena ketertiban administrasi yang mencakup laporan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan APBD desa dan prosedur administrasi untuk setiap kegiatan terkait pengolahan keuangan, dapat memudahkan masyarakat untuk menapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Pengelolaan keuangan gampong menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun, Gampong Lampoh Daya menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penggunaan dana yang belum optimal. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas program pembangunan yang direncanakan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat gampong [7].

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas SDM. Pengelolaan keuangan desa memerlukan pemahaman yang baik tentang akuntansi, manajemen keuangan, dan regulasi seperti penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sayangnya, banyak aparat desa di Gampong Lampoh Daya tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai di bidang ini. Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan dan laporan keuangan secara akurat. Kekurangan ini menyebabkan kesalahan administratif, keterlambatan pelaporan, atau bahkan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, yang pada akhirnya menghambat alokasi dana dan pelaksanaan program pembangunan [8].

Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan besar. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel. Namun, rendahnya keterlibatan masyarakat di Gampong Lampoh Daya, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari aparat desa terkait program yang direncanakan. Ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan anggaran desa memperburuk situasi ini. Akibatnya, masyarakat kurang memperhatikan penggunaan dana, yang dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan dana atau pelaksanaan proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat [9]. Tantangan lain adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan yang baik, tetapi di beberapa desa, termasuk Gampong Lampoh Daya, informasi tentang penggunaan anggaran desa tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini terlihat dari tidak adanya laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, serta minimnya forum pertemuan untuk mengevaluasi anggaran secara terbuka. Ketidaktransparanan ini menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat desa, bahkan memicu spekulasi tentang potensi penyalahgunaan dana, terlepas dari kenyataan yang terjadi.

Penyalahgunaan dana menjadi isu serius yang perlu perhatian lebih. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan keuangan, dan minimnya partisipasi masyarakat menciptakan peluang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan dana desa. Penyalahgunaan ini bisa berupa penggelapan dana, manipulasi dokumen keuangan, hingga pelaksanaan proyek fiktif. Dampaknya sangat merugikan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau layanan sosial tidak sampai ke sasaran [10].

Kombinasi dari tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Gampong Lampoh Daya. Upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat menjadi langkah utama untuk memastikan dana desa digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang baik memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sistem pengelolaan yang terencana, gampong dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti jalan, dan fasilitas umum lainnya, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan yang efektif juga membuka peluang untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberian akses modal. Dalam bidang sosial, pengelolaan keuangan yang transparan memungkinkan gampong menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih jauh lagi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya memastikan penggunaan dana sesuai kebutuhan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, menciptakan hubungan harmonis dan kolaboratif dalam mewujudkan tujuan pembangunan bersama[11].

Pengelolaan keuangan gampong menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai program. Sebagai contoh gampong lampoh daya menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangan. Kendalanya seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta penggunaan dana yang belum optimal sering menjadi hambatan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat gampong dan menghambat efektifitas program pembangunan yang direncanakan[3].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan di gampong lampoh daya kota banda aceh, menemukan masalah yang dihadapi dan memberikan saran untuk perbaikan. Dengan memahami praktik pengelolaan keuangan saat ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu membangun sistem pengelolaan yang lebih baik, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat digampong. Peneliti menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya untuk menentukan aspek apa yang membedakan penelitian sebelumnya. Dalam penelusuran ini, terdapat beberapa penelitian yang sebanding dari segi disiplin ilmu yang digunakan oleh peneliti saat ini dan beberapa penelitian yang memiliki tema yang mirip.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dirancang untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data langsung dari lingkungan alami. Penelitian ini berfokus pada menggali makna, pengalaman, dan pandangan partisipan dalam konteks tertentu. Desainnya bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan situasi, dimana peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan analisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena, dengan penekanan pada relevansi hasil untuk diterapkan pada konteks serupa, bukan untuk generalisasi luas[12].

2.1. Gambaran Umum Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh

Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh merupakan salah satu desa di Kota Banda Aceh yang memiliki keragaman penduduk serta potensi ekonomi yang mampu menunjang pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan keuangan desa ini mengikuti ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat guna menjamin penggunaan anggaran yang efisiensi dan tepat sasaran[4].

Struktur pemerintahan desa dipimpin oleh keuchik dan di dukung oleh perangkat desa seperti seketaris gampong, bendahara, dan kaur perencanaan. Mereka bersama sama mengelola berbagai sumber dana seperti dana desa, alokasi dana desa (AAD), dan pendapatan asli gampong (PAG) untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga[6].

Keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan, karena memastikan anggaran disusun dan dijalankan sesuai kebutuhan dan prioritas lokal.

2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.3. Tugas

1. Pengelolaan keuangan gampong

Dalam pengelolaan keuangan di gampong, kantor keuchik memegang peran utama dalam mengatur dan mengatur dan mengawasi pemakaian dana desa. Keuchik perlu menyusun rencana kerja tahunan bersama masyarakat, lalu membuat anggaran berdasarkan rencana tersebut. Setelah dana diterima, keuchik bertanggung jawab memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan. Keuchik juga wajib menyusun laporan keuangan secara transparan dan menyampaikan kepada masyarakat serta pihak pemerintah agar penggunaan dana desa bisa diketahui dan diawasi bersama.

2. SDM Pengelolaan Keuangan

Sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam pengelolaan keuangan gampong meliputi perangkat gampong, seperti seketaris gampong yang berperan dalam penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan, bendahara yang mengatur kas serta transaksi keuangan, dan kaur keuangan yang menangani pelaksanaan teknis administrasi keuangan. Kualitas SDM ini sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, pelatihan, pendamping teknis, dan pendamping teknis, dan pengawasan secara rutin sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam

memahami aturan, menyusun laporan yang baik, dan menjalankan sistem keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah penting karena warga dapat berpartisipasi dalam rapat musyawarah untuk menyampaikan pendapat dan menentukan program yang dibutuhkan oleh desa. Selama pelaksanaan kegiatan, masyarakat juga dapat turut serta membantu jalannya kegiatan tersebut. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan apabila terdapat hal yang tidak sesuai. Dengan keterlibatan aktif ini, masyarakat turut memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan benar bermanfaat untuk kepentingan bersama.

2.4. Fungsi

1. Fungsi kantor keuchik

- Perencanaan: Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan desa bersama masyarakat
- Pelaksanaan: Melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana dan anggaran yang telah disetujui bersama
- Pengawas: Memantau pelaksanaan kegiatan dan pemakaian dana agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Pelapor: Membuat laporan terkait keuangan dan pelaksanaan kegiatan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat serta pihak pemerintah

2. Fungsi SDM Pengelola Keuangan (Perangkat Gampong)

- Sekretaris Gampong: Membuat dokumen perencanaan kerja serta menyusun berbagai laporan administrasi
- Bendahara Gampong: Mengelola arus kas dan mendokumentasikan setiap transaksi keuangan yang terjadi
- Kaur Keuangan: Mempersiapkan dokumen anggaran, mencatat bukti pembayaran, serta menjaga keteraturan administrasi keuangan.

3. Fungsi Masyarakat

- Perencanaan: Menyampaikan pendapat dan turut menetapkan program melalui forum musyawarah desa
- Pelaksanaan: Turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan desa seperti pembangunan jalan, posyandu, dan berbagai program lainnya
- Pengawas: Memantau pemanfaatan dana serta memberikan masukan atau kritik agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara tepat dan merata

2.5. Struktur organisasi

Dengan diterbitkan peraturan gubernur mengenai struktur, tugas, fungsi, dan cara pemerintahan gampong. Hal ini semakin memperjelas dan mempertegas peran serta fungsi pemerintahan gampong dalam sistem pemerintahan yang lebih mandiri. Secara umum, struktur organisasi gampong terdiri dari: 1) Keuchik (Pimpinan Gampong), 2) Sekretariat Gampong, 3) Kasi Pemerintah, 4) Kasi Pelayanan, 5) Kasi Kesejahteraan, 6) Kaur Keuangan, 7) Kaur Umum dan Perencanaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Keuchik terdiri dari

1. Unsur Pimpinan yaitu Keuchik:

- Keuchik merupakan tokoh utama dalam kepemimpinan ditingkat gampong. Ia memikul tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan social masyarakat, serta mendorong pemberdayaan warga. Jabatan ini diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat setempat.

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:

Sekretariat Gampong berperan dalam mendukung tugas Keuchik, khususnya dalam hal administrasi dan pengelolaan tata usaha pemerintahan gampong. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum, keuangan, serta penyusunan berbagai laporan yang dibutuhkan.

3. Unsur pelaksana terdiri dari:

- Kaur keuangan: Bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan gampong, yang mencakup penyusunan anggaran serta pembuatan laporan keuangan secara berkala.
- Kaur umum dan pelaksanaan: Memiliki tugas dalam merancang program kegiatan serta mengukur administrasi umum guna mendukung kelancaran oprasional pemerintahan gampong
- Kasi pemerintah: Bertugas mengurus dokumen kependudukan serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintah ditingkat gampong
- Kasi kesejahteraan: Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat digampong
- Kasi pelayanan: Menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat, mencakup layanan dasar serta pengurusan administrasi yang dibutuhkan warga.

2.6. Sumber Daya Aparatur

Aparatur gampong merupakan personel yang bertugas menjalankan peran pemerintahan ditingkat desa. Berikut adalah gambaran sumber daya aparatur Gampong Lampoh Daya Tahun 2024:

Tabel 1. Sumber Daya Aparatur Gampong Lampoh Daya Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir	Masa jabatan
1	M. Wahyudi CMC	Keuchik	S1	2024-2030
2	Ir. Catur Wibowo	Sekretaris	S1	2024-2030
3	Amalia putri	Kaur Umum dan perencanaan	Sma	2024-2030
4	Mahendra	Kaur keuangan	Sma	2024-2030
5	Firdaus, S.H	Kasi kesejahteraan	S1	2024-2030
6	Ramadana, S.Sos	Kasi pelayanan	S1	2024-2030
7	Hasril	Kasi pemerintah	Sma	2024-2030
8	TGK. Nyak Gam Rahmat	Kepala dusun I	Sma	2024-2030
9	Muzakir Nyak Cut	Kepala dusun II	Sma	2024-2030
10	Abdullah	Kepala dusun III	Sma	2024-2030
11	Syahril	Kepala dusun IV	Sma	2024-2030

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kapasitas SDM Aparatur

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas aparatur gampong memiliki jenjang terakhir pada tingkat sma. Hanya sebagian kecil, terutama pada posisi strategis seperti keuchik, sekretaris, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, yang memiliki latar belakang Pendidikan tinggi seperti S1. Selain itu, sebagian besar aparatur masih berstatus honorer dan belum diangkat secara definitif, yang berpotensi memengaruhi kestabilan dan konsistensi kinerja organisasi.

- Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek pengetahuan, administrasi, dan pengelolaan keuangan.
- Minimnya kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala terhadap aparatur
- Ketergantungan terhadap aparatur berstatus honorer menyebabkan kurangnya kesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat.

3.1 Implikasi terhadap pengelolaan keuangan gampong

Evektifitas pengelolaan keuangan gampong dipengaruhi secara langsung oleh kompetensi aparatur desa dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan. Untuk memperjelas, tabel dibawah ini memaparkan perbandingan antara alokasi dana dan realisasi penggunaan pada tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan[11].

Tabel 2. Implikasi Pengelolaan Keuangan Gampong

Tahapan	Kegiatan utama	Anggaran	Realisasi	Persentase	Surplus
Perencanaan	Musyawarah desa untuk menyusun	9.012.000,00	8.250.000.00	91%	762.000.00

	rencana kerja pemerintah gampong (RKPG)					
Penganggaran	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG)	7.974.000,00	7.900.000,00	99,07%	74.000.00	
Pelaksanaan	Pencatatan semua transaksi keuangan gampong	1.544.072.096	722.346.055	46,78%	821.726.041	
Pelaporan	Penyusunan laporan pertanggung jawaban	7.974.000,00	7.900.000,00	99,07%	74.000.00	
	Jumlah	1.569.032.096,00	746.396.055,00	47,57%	822.636.041,00	

Sumber: Sikeudes (2024)

Data dan implikasi pengelolaan keuangan gampong yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 9.012.000, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 8.250.000, sehingga terdapat sisa dana sekitar Rp 762.000. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPG) berjalan cukup baik dan mendekati rencana awal, dengan adanya efisiensi anggaran yang menunjukkan pengelolaan yang cukup efektif[13].

2. Penganggaran

Pada tahap penganggaran, dari total anggaran sebesar Rp 7.974.000, telah direalisasikan sebesar Rp 7.900.000, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 74.000. selisih yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBG) telah dilaksanakan dengan sangat baik dan hampir sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan

Pada tahap penatausahaan, dari total dana yang tersedia sebesar Rp1.544.072.096, baru terealisasi sebesar Rp722.346.055. Dengan demikian terdapat sisa dana sebesar Rp821.726.041 yang belum tercatat atau belum digunakan. Selisih yang cukup besar ini menunjukan adanya permasalahan dalam proses pencatatan transaksi keuangan gampong. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan administrasi keuangan, adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi, atau belum optimalnya pemanfaatan sistem aplikasi keuangan desa seperti sikeudes[14].

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan, dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7.974.000, realisasi penggunaan dana mencapai Rp7.900.000, dengan selisih yang hanya sebesar 74.000. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan pertanggung jawaban telah dilaksanakan dengan sangat baik dan hampir sepenuhnya sesuai dengan rencana.

Untuk melihat pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun, berikut ini disajikan perbandingan data realisasi anggaran tahun 2023 yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan gampong pada tahun sebelumnya. Data ini menjadi dasar untuk menganalisis pencapaian serta kendala yang dihadapi pada masing-masing tahapan pengelolaan keuangan.

Tabel 3. Implikasi Pengelolaan Keuangan Gampong

Tahapan	Kegiatan utama	Anggaran	Realisasi	Persentase	Surplus
Perencanaan	Musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pemerintah gampong (RKPG)	525.500,00	469.009,00	89,27%	56.491,00
Penganggaran	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG)	13.006.000,00	12.481.179,00	95,96%	524.821,00
Pelaksanaan	Pencatatan semua transaksi keuangan gampong	1.712.644.696	1.510.873.844	88,19%	201.770.852,00
Pelaporan	Penyusunan laporan pertanggung jawaban	13.006.000,00	12.481.179,00	95,96%	524.821,00
	Jumlah	1.739.182.196,00	1.548.305.211,00	92,35%	202.876.985,00

Sumber: Sikeudes (2024)

Berdasarkan data dalam Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Gampong Lampoh Daya tahun 2023 sudah menunjukkan capaian yang cukup baik dengan tingkat realisasi mencapai 92,35%. Namun demikian, masih terdapat surplus yang cukup besar, khususnya pada tahap pelaksanaan, yang mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum seluruhnya terserap. Temuan ini memperkuat analisis bahwa perlu adanya peningkatan efektivitas dalam penggunaan dana pada tahap implementasi agar program pembangunan desa dapat berjalan secara optimal[15].

4.1 Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori serta metodologi penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang telah dipilih secara cermat. Pemilihan informan menjadi aspek penting dalam penelitian untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi : 1) Aparatur Gampong, 2) Masyarakat Gampong.

Analisis mengenai pengelolaan keuangan gampong ini disusun berdasarkan ketentuan terbaru, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam analisis ini dibahas dalam tiga pokok bahasan, yaitu: 1) Pengelola Keuangan Gampong, 2) SDM Pengelola Keuangan, 3) Peran masyarakat. Hasil penelitian ini nantinya akan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku saat ini serta dengan konsep yang relevan mengenai pengelola keuangan gampong. Melalui perbandingan tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai bagaimana kondisi ideal maupun kondisi nyata dari pengelola keuangan gampong, SDM Pengelola Keuangan, Peran Masyarakat di Gampong Lampoh Daya, Kota Banda Aceh[15].

4.1.1 SDM Pengelola Keuangan

1. Apa faktor utama yang memicu terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan gampong? Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak wahyudi selaku keuchik gampong lampoh daya kota banda aceh sebagai berikut:

“Kalau soal aturan keuangan desa, memang sering ada perubahan setiap tahunnya. Tapi jujur saja, digampong kami kadang ga selalu dapat sosialisasi atau pelatihan tentang aturan aturan yang baru. Jadi banyak diantara kami yang masi pakai cara lama seperti yang dulu diajarkan. Misalnya dalam buat laporan atau penggunaan dana, format dan caranya masih pakai yang lama, padahal sekarang kami khawatir, nanti malah salah kiarena nggak ikut perkembangan terbaru”

Terkait pengelolaan keuangan bapak Firdaus selaku kasih kesejahteraan juga memberi pendapat dokumentasi yang tidak rapi dan terstruktur yaitu[16]:

“Selama ini, masalah yang sering kami hadapi itu soal penyimpanan dokumen keuangan. Kadang bukti transaksi kayak nota atau kwintansi itu nggak langsung disimpan ditempat khusus. Ada yang numpuk dimeja, ada juga yang nyeli8b ntah kemana. Jadi pas waktu bikin laporan, kami kelambatan nyari dokumen pendukungnya. Kadang juga karena nggak diberi keterangan lengkap, kita sendiri lupa itu buat kegiatan apa. Harusnya ada sistem penyimpanan yang rapih, misalnya, dipisah perkegiatan, tapi belum sampai kesitu. Jadi ya sering kali laporan jadi lambat atau malah revisi dokumen nggak lengkap atau susah dicari”

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan Pengelolaan keuangan di Gampong Lampoh Daya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), minimnya transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang menyebabkan potensi terjadinya kesalahan dalam perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Keterbatasan pemahaman aparat desa terkait penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi salah satu kendala utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan masih rendah, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa kurang optimal.

REFERENCES

- [1] R. Sari *et al.*, *Jurnal Akuntansi*, vol. 13, no. 3, 2023.
- [2] D. Angriani, N. Ramadhani, R. Afrizal, and I. Marta, “Akuntabilitas Aparatur Gampong Ujong Drien Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Tahun,” vol. 3. pp. 117–128, 2023.
- [3] N. Ferarow and J. Suprihanto, *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas*, vol. 1, no. 2. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2018. doi: 10.18196/jati.010207.
- [4] Y. Mutia Basri, T. Desti Marianti, and R. Rofika, “Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya,” *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 34–50, 2020, doi: 10.30656/jak.v8i1.2379.



- [5] T. Sunaryadi and H. Y.-K. J. Ilmiah, “Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Jembrak Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang,” *Journal.Stekom.Ac.Id*, vol. 14, no. 1, pp. 154–159, 2021, doi: <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/386>.
- [6] M. Z. Abidin, “Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 61–76, 2015.
- [7] R. Asoka, “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, vol. 14, no. 1, pp. 84–100, 2018, doi: 10.35449/jemasi.v14i1.22.
- [8] N. E. Makaminang, V. Ilat, and H. R. N. Wokas, “Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado,” vol. 6, no. 1. pp. 325–334, 2022.
- [9] J. A. F. Stoner and R. G. Greenwood, *Management: Study Guide and Workbook*. Prentice-Hall, 1982. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=PUSWR_PLtm0C
- [10] W. Sulistiyowati, “Buku Ajar Statistika Dasar,” *Buku Ajar Statistika Dasar*, vol. 14, no. 1, pp. 15–31, 2017, doi: 10.21070/2017/978-979-3401-73-7.
- [11] R. Arviyanda, E. Fernandito, and P. Landung, “Analisis Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa,” *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, vol. 1, no. 1, p. 67, 2023, doi: 10.47256/jhnb.v1i1.338.
- [12] D. S. Charismana, H. Retnawati, and H. N. S. Dhewantoro, “Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta,” *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, vol. 9, no. 2, pp. 99–113, 2022, doi: 10.36706/jbti.v9i2.18333.
- [13] M. Mahyudin, L. M. F. Mihzan, A. Asrin, and N. Nurlinda, “Sumber Daya Manusia Pemrintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa,” *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, vol. 11, no. 1, pp. 82–88, 2022, doi: 10.33366/jisip.v11i1.2444.
- [14] H. Diyati and M. Muhyadi, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di Sdn Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman,” *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, vol. 2, no. 1, pp. 28–43, 2014, doi: 10.21831/amp.v2i1.2407.
- [15] S. Mentari Tumbel, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Politico*, vol. 6, no. 1, pp. 1–21, 2017.
- [16] A. Nurjaya, I. A., J. D., and D. Sunarsi, “Pengaruh Kompetensi SDM Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Gunung Kidul,Yokyajarta,” *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, vol. 4, no. 3, p. 346, 2021, doi: <https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Kompetensi-Sumber-Day-Manusia-Dan-Kinerja-Nurjaya-Affandi/c7e9958246097d200e181857c663a9e5da31aef4>.